

**PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA
PEMBERI GADAI DAN PENERIMA GADAI PADA
PERUM PEGADAIAN CABANG COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**



Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

IRFAN ZAINUDIN

C 100 050 41

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya peran lembaga keuangan termasuk pegadaian saat ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dana untuk memenuhi berbagai keperluan dengan cara yang cepat dan mudah. Keperluan tersebut meliputi keperluan produktif seperti untuk modal usaha/perdagangan dan keperluan konsumtif seperti untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari misalnya sandang, pangan papan dan lain sebagainya.

Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat. Pemenuhan atas sejumlah uang guna memenuhi dan menunjang kebutuhan sehari-hari umumnya dilakukan dengan bekerja. Dari bekerja tersebut dihasilkan sejumlah uang/penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Namun adakalanya penghasilan yang diperoleh tersebut masih kurang dan tidak dapat menutupi kebutuhan akan sejumlah uang terutama di saat-saat mendesak atau tidak terduga yang harus segera dipenuhi dalam waktu singkat. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan melalui kredit pada lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank.

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, bidang hukum juga perlu perhatian secara serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah lembaga jaminan. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan adalah sebagaimana konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung

jawab pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan demikian sering dilakukan oleh Warga Negara Indonesia pada umumnya, karena sudah menjadi kebutuhan rakyat, yang akhirnya memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya.¹ Dengan perkreditan tersebut, timbullah hubungan hukum antara para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur sering disertai dengan jaminan. Jaminan itu dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang. Dalam hal ini yang akan dibicarakan adalah hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gadai”².

Dalam prakteknya, kegiatan Perum Pegadaian merupakan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Kegiatan tersebut merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Keterkaitan lembaga pegadaian dengan hukum sangat erat dilihat dari aspek perumusan gadai dan perjanjian pada gadai. Pengaturan mengenai gadai tunduk pada

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm.1.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2002, hlm. 170.

KUH Perdata buku kedua bab ke XX Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160.³ salah satu yang paling mendasar adalah akad atau perjanjian yang digunakan oleh pegadaian karena dari akad atau perjanjian inilah timbul hubungan hukum.

Hubungan hukum di Lembaga pegadaian ini adalah hubungan antara pemberi gadai/debitur dengan penerima gadai/kreditur yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian ini menimbulkan konsekuensi bagi para pihaknya. Apabila menghendaki pinjaman sejumlah uang melalui pegadaian, masyarakat cukup menjaminkan barang-barang bergerak yang memenuhi syarat, untuk dijadikan jaminan kepada pegadaian. Dengan proses yang sederhana, cepat dan mudah masyarakat akan mendapatkan sejumlah uang yang diinginkan tanpa harus menunggu lama dan persyaratan yang berbelit-belit.

Saat pelaksanaan peminjaman uang berdasarkan Hukum Gadai pada Pegadaian, maka debitur harus datang ke pegadaian untuk menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atas uang yang telah dipinjamnya. Pegadaian selaku kreditur, akan menguasai barang yang dijaminkan oleh debitur sampai dilunasinya pinjaman tersebut berdasarkan waktu jatuh tempo pada Surat Bukti Kredit (SBK). Perjanjian antara kreditur dengan debitur dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang formatnya merupakan perjanjian baku/standar yang dibuat sepihak oleh pihak kreditur. Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) ini memuat klausul-klausul yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Dalam praktiknya, perjanjian gadai ini

³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed. 1. Cet. 1, hlm. 35.

dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Pegadaian secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama, alamat jenis barang jaminan, jumlah taksiran, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo diisi oleh pihak Perum Pegadaian.⁴

Hak gadai merupakan tambahan dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang keberadaannya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian, hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.⁵

Subyek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai (*pandgever*).⁶

Pegadaian menyalurkan pinjaman berupa uang berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh

⁴ *Ibid*, hlm. 44.

⁵ Purwahid Patrik dan Kushadi, *op. cit.*, hlm 14.

⁶ H. Salim HS, *op. cit.*, hlm 36.

pemberi gadai kepada penerima gadai sehingga barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asa *inbezitzeteling*. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yaitu :

”Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan di berhutang atau di pemberi gadai, ataupun yang kemali publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai”.⁷ Ratio dari penguasaan inilah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.⁸

Saat pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada pihak Pegadaian, maka kekuasaan atas benda tersebut beralih kepada pihak Pegadaian yang selanjutnya disebut pihak pemegang gadai. Penguasaan terhadap benda gadai tersebut berlangsung sampai debitur atau nasabah melunasi hutangnya. Dengan begitu pihak Pegadaian bertanggungjawab atas benda jaminan tersebut sampai pada saat debitur atau nasabah melunasi hutangnya. Akan tetapi, hak menguasai barang itu tidak meliputi hak unuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan.⁹

Pegadaian sebagai pihak kreditur, untuk mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada pihak nasabah atau debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang bergerak kepunyaan nasabah/debitur sebagai jaminan atas pelunasan utangnya. Dengan adanya jaminan tersebut maka apabila debitur lalai

⁷ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung, 1978, hlm. 72.

⁸ MAriam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Credit Verband, gadai, dan fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm. 57.

⁹ Sri Soedewi Masjehoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty. Yogyakarta, Cet. V, 2000, hlm. 8.

mengembalikan pinjaman, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian/seluruh hasil penjualan untuk melunasi utang debitur.¹⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“Apabila oleh pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai, dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.¹¹

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pokok pada gadai adalah perjanjian pinjam uang, sedangkan hak gadai sifatnya *accessoir*, namun pada perkembangannya pelaksanaan dari perjanjian hutang-piutang ini mengarah pada perjanjian kredit. Hal ini terlihat pada perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian yaitu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Perjanjian ini sifatnya sepihak karena dibuat oleh pihak Pegadaian. Penawaran Produk pinjaman di Pegadaian berupa produk perkreditan, yaitu Kredit Cepat dan Aman (KCA), Kredit Jual Tunda Komoditas Pertanian (gadai gabah), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan RAHN (gadai syariah). Produk Pegadaian yang lain yaitu : Usaha Jasa Taksiran/Sertifikasi atas nilai harta perhiasan, Usaha Sewa Gedung, Usaha Jasa Titipan, Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Perjanjian dalam Pegadaian itu ada dua perjanjian yaitu perjanjian pinjam uang sebagai

¹⁰ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm, 8.

¹¹ Purwahid Patrik dan Kushadi, *op. cit.*, hlm. 23.

perjanjian pokok dan perjanjian gadai sebagai pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Dalam prakteknya Pegadaian menggunakan Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam (Surat Bukti Kredit), sedangkan istilah Perjanjian Kredit lazimnya digunakan dalam praktek perbankan. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presidium kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir skripsi dengan judul : **”Pelaksanaan Perjanjian Yang Dibuat Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian yang dibuat antara pemberi gadai dan penerima gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar ?.

¹² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta. Cet. III, 2005, hlm. 97.

2. Bagaimanakah tanggungjawab hukum dalam perjanjian yang dibuat antara pemberi gadai dan penerima gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian yang dibuat antara pemberi gadai dan penerima gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dalam perjanjian yang dibuat pemberi gadai dan penerima gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar.

2. Tujuan Subyektif

Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah kegunaan yang didapat dari suatu penelitian. Adapun manfaat yang di harapkan adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang berguna di bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya tentang gadai

- b. Untuk menambah kepustakaan dan wawasan para pihak yang tertarik dengan masalah hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada pihak yang berwenang untuk penyempurnaan pelaksanaan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian gadai.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh hasil yang valid dan reabel, maka diperlukan adanya metode yang mempunyai fungsi untuk memberikan patokan atau pedoman dalam menganalisis, mempelajari dan memahami keadaan yang di hadapi peneliti dalam suatu penelitian¹³.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian sosiologis (non-doktrinal) yakni penelitian atas hukum yang tidak dikonsepsikan dan dikembangkan sebagai ketentuan hukum (*rules*) tetapi sebagai kenyataan sosial (*regularities*) yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.¹⁴, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986,hal 87.

¹⁴ Ahmad Ubbe, *Kedudukan dan Fungsi Penelitian Hukum dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1998, hal 92.

2. Metode Penelitian

Berdasar metodenya, merupakan suatu penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹⁵. Penelitian ini untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendeskripsikan peranan perusahaan jasa penilai bagi perbankan dalam kaitanya dengan pemberian kredit dan tanggung jawab hukum perusahaan jasa penilai.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa keterangan yang diberikan para responden/nara sumber, yakni :

- 1) Kepala Cabang Perum Pegadaian
- 2) Pemberi gadai (nasabah)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian bahan-bahan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan data dari orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku maupun artikel dan dapat diperoleh tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 63.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:
 - (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian
 - (c) Dokumen Perjanjian
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan perusahaan pegadaian.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan adanya data akan sangat menunjang dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan¹⁶.

¹⁶ Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 67.

a. Penelitian lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara¹⁸.

1) Observasi dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis.

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berdasar kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden untuk memperoleh data.

b. Studi kepustakaan digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah ilmiah serta hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan studi dan identifikasi dari komponen yang membentuk segala sesuatu yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data non statistik. Setelah semua data diperoleh dengan cara-cara dalam teknik pengumpulan data, kemudian data yang terkumpul tersebut dianalisis untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, penulis kumpulkan dan penulis analisis secara logis sistematis.

Salanjutnya hasil dari analisis tersebut penulis gunakan untuk memecahkan

¹⁸ Lexy J. Moleong, 2006, *Ibid*, halaman 89.

permasalahan yang penulis ajukan didalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif ¹⁸, yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu.
- b. Pengkategorisasian data yaitu dengan mengemukakan data dan segala informasi yang telah diperoleh dari nara sumber baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), data disusun berdasarkan kategori-kategori itu saling berhubungan satu sama lain.
- c. Analisis data dengan analisis komparatif, dimana akan diadakan pemeriksaan terhadap persamaan-persamaan dan perbedaan dari keseluruhan kategori yang ada.
- d. Penafsiran data dimana teori-teori yang telah ada akan diaplikasikan ke dalam data sehingga akan menjadi kesesuaian antara teori.

F. Sistematika Skripsi

Isi skripsi akan lebih mudah dipahami dengan adanya sistematika skripsi. Adapun sistematika skripsi ini yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 120.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Unsur-unsur Perjanjian.
3. Asas-asas Perjanjian.
4. Syarat-syarat Sah Perjanjian
5. Wanprestasi
6. Overmach
7. Berakhirnya perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian tentang Gadai
2. Dasar hukum Gadai
3. Sifat Gadai
4. Subyek Gadai
5. Obyek Gadai
6. Kewenangan Pemberi Gadai
7. Proses Terjadinya Gadai
8. Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai
9. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai
10. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai
11. Hapusnya Hak Gadai

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian yang dibuat antara Pemberi Gadai dan Penerima gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar.
- B. Tanggungjawab hukum dalam perjanjian yang dibuat antara Pemberi Gadai dan Penerima gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN